

RINGKASAN

“PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI KATALOG ELEKTRONIK V.6 (INAPROC) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR”, Ahmad Fauzain Al Kayyis, Nim D42220431, Tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Enny Budhiarti (Pembimbing Lapangan) dan Avisenna Harkat SE., M.M. (Dosen Pembimbing).

Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember memiliki bobot 20 Satuan Kredit Semester (SKS), dengan jangka waktu 4 bulan efektif mulai bulan September hingga Desember 2025 atau setara dengan 700 jam, dan dilakukan pada awal semester VII (tujuh). Dukungan pelaksanaan kegiatan magang oleh Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan salah satu instansi vertikal yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pusat koordinasi bagi enam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Struktur organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur terdiri dari 1 bagian dan 5 bidang, diantaranya Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Lelang, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, serta terdapat Jabatan Fungsional. Bagian Umum melaksanakan beberapa tugas salah satunya adalah melakukan urusan tata usaha dan pengelolaan rumah tangga. Salah satu upaya guna mendukung pelaksanaan tugas urusan tata usaha dan pengelolaan rumah tangga yaitu dengan melakukan proses pengadaan barang maupun jasa melalui katalog elektronik V.6 (inaproc).

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dengan melakukan *login* menggunakan *user* dan *password* Pejabat Pengadaan (PP) kemudian melakukan pencarian barang/jasa, melakukan negoisasi lalu mengirimkan kepada PPK untuk

direview dan tahapan terakhir pengadaan barang/jasa pemerintah ialah dengan melakukan pembayaran sesuai yang dipilih PPK serta pengisian penilaian penyedia.